



**Kementerian PPN/  
Bappenas**

## **e-Kliping Digital Media Online**

**Sarana & Prasarana**

**Rabu, 24 November 2021**



**BIRO HUMAS DAN TATA USAHA PIMPINAN  
Perpustakaan & Kearsipan  
Jakarta  
2021**

## **Daftar Isi**

1. TARGET PENCAPAIAN SDGs TIDAK BERGESER - *Media Online Kompas*

# Target Pencapaian SDGs Tidak Bergeser

Pandemi Covid-19 tidak memengaruhi komitmen pemerintah terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

**JAKARTA, KOMPAS** — Percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs membutuhkan pendanaan yang besar. Pandemi Covid-19 telah memperbesar celah pembiayaan SDGs yang sebelumnya sudah cukup lebar. Dengan adanya pandemi, kebutuhan pendanaan SDGs di tingkat global diperkirakan meningkat 70 persen. Meskipun celah pembiayaan makin lebar, target pencapaian SDGs di Indonesia tetap tidak bergeser.

"Arahan Bapak Presiden bahwa komitmen pemerintah terhadap SDGs tidak pernah berubah. Meskipun kita masih berjuang untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, target pencapaian SDGs tidak boleh bergeser. Bahkan, Indonesia tetap bertekad untuk menjadi yang terdepan dalam pencapaian SDGs," ujar Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam konferensi video pada acara Indonesia's Sustainable Development Goals Annual Conference 2021, Selasa (23/11/2021).

Menurut Wapres, presidensi G-20 Indonesia akan menjadi momentum yang baik untuk mengusung agenda strategis di tingkat global, termasuk dalam pencapaian SDGs. Kolaborasi dibutuhkan untuk membunikan SDGs ke dalam aksi-aksi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Kolaborasi juga dibutuhkan untuk menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola yang merupakan empat pilar utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kenyataan tentang makin lebarnya celah pembiayaan SDGs ini sekaligus menunjukkan pentingnya inovasi pembiayaan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, baik di tingkat global, nasional, daerah, maupun tingkat desa, untuk menutup celah pembiayaan. "Aspek pembiayaan ini menjadi kunci, mengingat kesiapan dan respons setiap negara berbeda, khususnya antara negara maju dan negara berkembang," ujarnya.

Wapres mengimbau agar pencapaian tiap-tiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

dilakukan secara terukur dan terarah serta disesuaikan dengan konteks Indonesia. Dalam pencapaian tujuan pertama SDGs untuk mengatasi kemiskinan ekstrem secara global pada tahun 2030, misalnya, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar target mengatasi kemiskinan ekstrem dicapai lebih awal dengan target nol persen pada 2024.

Terkait pencapaian tujuan kedua SDGs, pemerintah juga ingin penurunan angka prevalensi stunting (tengkes) menjadi 14 persen pada 2024 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. "Pada prinsipnya, kita harus terus memastikan SDGs dicapai dengan upaya inklusif, *no one left behind*, sehingga tidak ada satu pun orang, wilayah, ataupun negara yang tertinggal," kata Wapres.

## Pendanaan

Dalam sambutannya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa juga menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak menurunkan target pencapaian SDGs yang telah ditetapkan pada 2030. "Komitmen tersebut tentunya memerlukan tata kelola kelembagaan dan mekanisme kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan pendekatan yang tidak *business as usual*," katanya.

Menurut Suharso, salah satu tantangan besar dalam pencapaian target SDGs adalah pembiayaan. Indonesia's Sustainable Development Goals Annual Conference 2021 dengan tema "Pendanaan Inklusif untuk Pencapaian SDGs 2030" ini diharapkan bisa memberikan masukan dan rekomendasi tentang pendanaan yang inovatif dan inklusif. Peserta bisa saling berbagi tentang pengalaman strategi pendanaan SDGs dari perspektif global dan nasional sekaligus memetakan kebutuhan dan peluang pendanaan untuk SDGs.

Tahun ini, Indonesia telah memasuki tahun keenam dalam mewujudkan komitmen global dalam pelaksanaan SDGs. Sebagai wujud komitmen

Indonesia, agenda SDGs telah diurutkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional. Sebagai koordinator pelaksanaan SDGs, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah empat kali menggelar konferensi SDGs yang melibatkan peran multipihak, seperti dunia usaha dan industri, filantropi, pakar dan akademisi, organisasi kemasyarakatan, serta media.

Dalam konferensi tahunan SDGs 2021 ini, pemerintah juga akan meluncurkan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau RAN-SDGs 2021-2024. Wapres berharap Kementerian PPN/Bappenas dapat terus menyalurkan koordinasi pemangku kepentingan dalam pencapaian SDGs. "Waktu kita makin pendek, terlambat bukanlah suatu pilihan karena terdapat risiko krisis kemanusiaan yang akan kita tanggung dan pertaruhkan," ujarnya.

## Tantangan

Akibat pandemi Covid-19, menurut Wapres, dunia telah mengalami perubahan besar. Pandemi tidak hanya mengubah kehidupan manusia, tetapi juga mengakibatkan krisis ekonomi di berbagai belahan dunia. Pelaku ekonomi informal, kaum perempuan, penyandang disabilitas, pengungsi, dan masyarakat rentan lain menjadi kelompok yang paling terdampak.

Selain pandemi, tantangan perubahan iklim juga semakin nyata, sebagaimana dibahas dalam pertemuan tentang iklim COP 26 di Glasgow, Skotlandia, bulan lalu. Terobosan penanganan dampak perubahan iklim secara universal sangat di-

butuhkan untuk mencegah timbulnya krisis kemanusiaan yang mendalam.

"Berbagai tantangan tersebut, di sisi lain, justru mampu menumbuhkan kesadaran bersama untuk melakukan transformasi pembangunan dan menyeimbangkan dimensi sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Pandemi ataupun perubahan iklim membangun kesadaran bahwa untuk mengatasi persoalan global, dibutuhkan tindakan kolektif secara global pula," kata Wapres.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, SDGs yang merupakan komitmen global menjadi semakin penting untuk menjadi panduan, kerangka, dan agenda bersama yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini demi menyelamatkan baik generasi hari ini maupun generasi masa depan.

Suharso menambahkan bahwa kombinasi pendekatan antara edukasi, *entertainment*, serta teladan nyata implementasi SDGs terbukti cukup efektif untuk dipahamkan generasi muda. Dalam konferensi kali ini, pemerintah juga melibatkan duta kampus dari 11 SDGs Center. Saat ini telah terbentuk 25 SDGs Center di sejumlah universitas.

Hingga kini terdapat 31 provinsi yang menetapkan rencana aksi daerah SDGs dengan peraturan gubernur. Untuk memobilisasi sumber-sumber pembiayaan non-pemerintah melalui SDGs Financing Hub, pemerintah menjalin kerja sama dengan berbagai institusi untuk mobilisasi dan fasilitasi penyaluran sumber-sumber pendanaan inovatif bagi kegiatan SDGs. (WKM)

Hlm: 8 - Kolom: Humaniora